



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Sasaran 1: Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni



Sasaran 2: Menurunnya Permukiman Kumuh





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2024 dengan target yang direncanakan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian kinerja. Oleh karena itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan tugas tahun anggaran 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.

Akhirnya kami berharap Laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lolak, Januari 2026

KEPALADINAS,

YARLISAWALUDDINHATAM, ST, ME

Pembina Utama Muda
Nip.197107222000121003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Permasalahan Utama.....	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja.....	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2024.....	25
3.2. Realisasi Anggaran.....	40
Grafik Realisasi Anggaran.....	41
3.3. Anggaran dan Realisasi per Kegiatan.....	42
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan atas capaian kinerja organisasi.....	44
4.2. Saran dan tindak lanjut.....	45



LAMPIRAN LKIP TAHUN 2025:

1. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran SK IKU
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Kinerja
4. Pohon Kinerja
5. Cascading
6. Rencana Aksi
7. Tabel Keselarasan
8. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
9. Perjanjian Kinerja (PK)



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow	8
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1a	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan Dan Pendidikan.....	9
Tabel 1.1b	Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan Dan Pendidikan Terakhir.....	10
Tabel 1.1c	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Diklat Struktural.....	11
Tabel 1.2.	Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab yang mempengaruhi Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	14
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025	18
Tabel	Prosentase Rumah Layak Huni Terhadap Target RPJMD/RPD	29
Tabel	Penanganan RTLH Per Kecamatan s/d Tahun 2025.....	29
Tabel	Daftar Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.....	36
Tabel 3.1.	Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.....	40
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	41
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) **Tipe B** yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;



4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa;

Sedangkan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan program dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehBupati.



2. Sekretaris;

- a. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan pelayanan administrasi lingkup unit kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; dan
- e. Pelaporan Pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- a. Mempersiapkan rencana kegiatan tahunan;
- b. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
- c. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan, registrasi, menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan pimpinan;
- f. Menyusun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur dari Bidang/Unit kerja terkait lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas (SPT/SPPD);
- h. Mengumpul, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris asset, arsip, dokumentasi dan argumentasi;



- k. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 - l. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;
 - m. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - n. Melaksanakan administrasi rumah tangga dan perlengkapan;
 - o. Menyusun Daftar Nominatif dan Daftar Urut Kependudukan(DUK);
 - p. Melaksanakan Kegiatan rekapitulasi data kehadiran pegawai online (fingerprint) dan manual di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - q. Membuat laporan pelaksanaan tugas;dan
 - r. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. *Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan ;*
- a. Mempersiapkan rencana kegiatan tahunan;
 - b. Mengkompilasikan dan menyusun rencana strategis, serta rencana kerja tahunan dan menengah Dinas;
 - c. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran dinas;
 - d. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - e. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;



- g. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- h. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- i. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- j. Menyusun rencana penggunaan uang permata anggaran;
- k. Menyusun laporan keuangan;
- l. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
- m. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- n. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- o. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
- p. Memberikan pertimbangan kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perumahan;

- a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
- b. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan.

6. Bidang Kawasan Permukiman;

- a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.



7. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman
- b. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman,
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten.

8. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

- a. Menyusun masukan teknis kelembagaan proyek khusus untuk penyelenggaraan tata bangunan.
- b. Menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek tidak sederhana.
- c. Melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang
- d. Menyusun masukan teknis master program, project digest ,dan petunjuk operasioanl (PO) proyek tidak sederhana.
- e. Menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek khusus.
- f. Monitoring dan evaluasi proyek khusus.
- g. Melakukan uji bahan bangunan proyek khusus untuk menyusun laporan kendali mutu.
- h. Melakukan test beban proyek khusus untuk menyusun laporan kendali mutu.
- i. Menyusun sistem pembangunan proyek khusus untuk melaksanakan tugas pengelola teknis.
- j. Mengadakan penyediaan jasa konstruksi proyek khusus.
- k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T 3 bangunan khusus.
- l. Melakukan perhitungan penilaian lahan bangunan aktual(present value) bangunan tidak sederhana.



- m. Menyusun form-form pemeriksaan bangunan khusus untuk melaksanakan perawatan, pemeliharaan bangunan dan perbaikan bangunan gedung.
- n. Menyusun form-form untuk penilikan bangunan tidak sederhana.
- o. Menyusun manual pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan tidak sederhana.
- p. Memeriksa kelengkapan disain bangunan akan perlengkapan kebakaran bangunan tidak sederhana.
- q. Mengevaluasi hasil uji bahan dan peralatan terhadap api untuk bangunan tidak sederhana.
- r. Menyusun pengembangan rencana bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perenc. teknis detail (DED) bangunan gedung.
- s. Menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa;

- a. Menyusun rencana kerja UPTD.
 - b. Menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan rumah Rusunsewa.
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan rumah susunsewa.
 - d. Melaksanakan teknis operasional pengelolaan rumah susunsewa.
 - e. Melaksanakan ketatausahaan UPTD.
 - f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas rumah susun sewa.
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD, dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut :



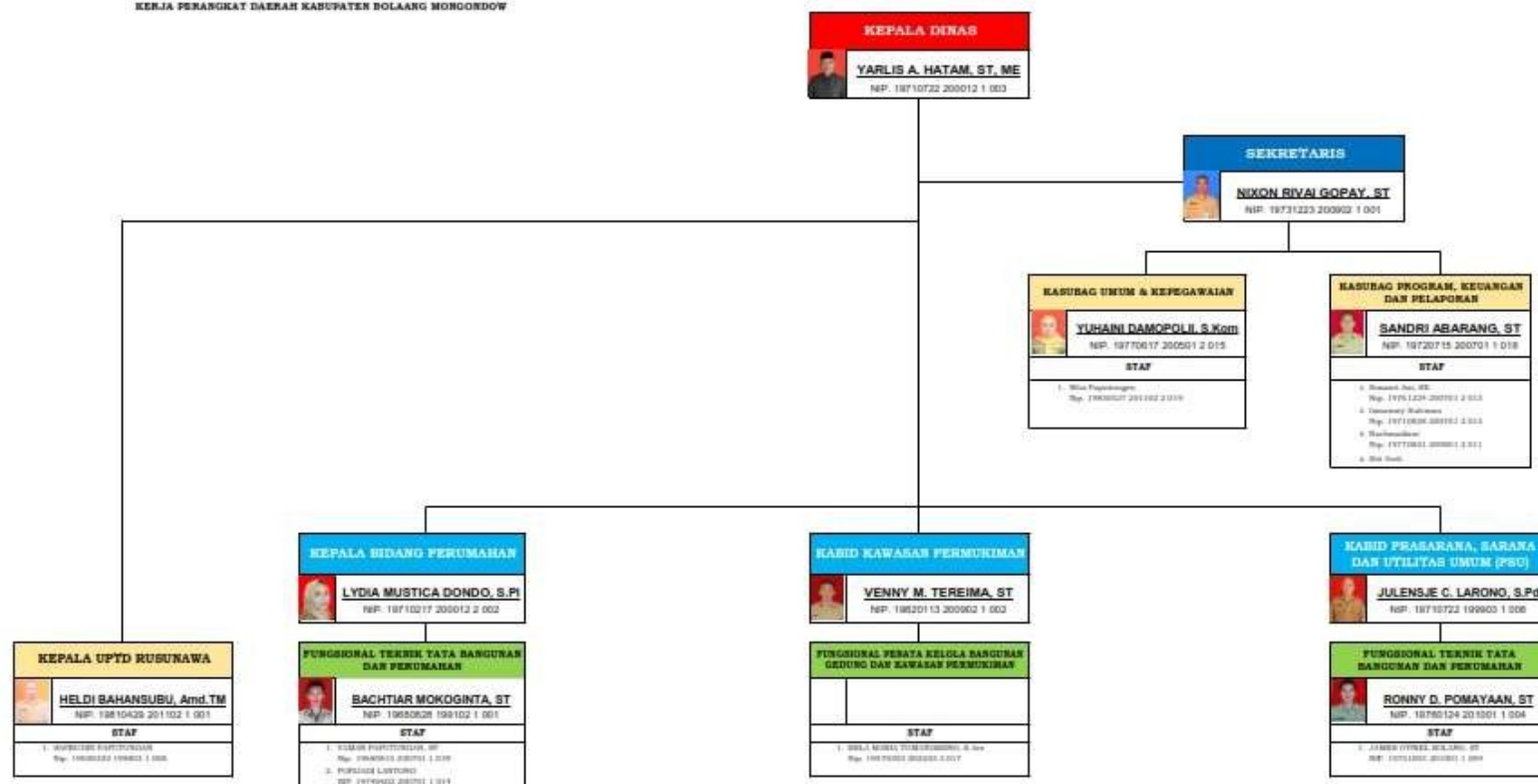
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak email : dppkbolmong@gmail.com

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW





Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas, sampai dengan bulan Desember 2023 jumlah personil Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 21 orang, untuk Pangkat/Golongan, Jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini ;

Tabel.1.1a
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Pendidikan Terakhir Educational Attainment	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sampai dengan SD	-	-	-	
SLTP / Sederajat	-	-	-	
SLTA / Sederajat	2	3	5	
Diploma I	-	-	-	
Diploma II	-	-	-	
Diploma III	1	-	1	
Diploma IV	-	-	-	
Strata 1 / S1 / Bachelor's Degree	8	5	13	
Strata 2 / S2 / Master's Degree	2	-	2	
Strata 3 / S3 / Doctoral	-	-	-	
Jumlah / Total	13	8	21	

Dari Uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa, sekitar 62% personil PNS di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didominasi oleh personil yang berbasis pendidikan S1. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan upaya pembinaan pegawai melalui kursus-kursus, diklat-diklat teknis, serta kesempatan belajar program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesemuanya ini dilakukan dalam upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman.



Tabel 1.1b
Komposisi ASN
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Terakhir

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Yarlis Awaluddin Hatam, ST. ME Nip.197107222000121003	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas	S2
2	Nixon Rivai Gopay, ST Nip.197312232009021001	Pembina Tingkat I/IV b	Sekretaris	S1
3	Julensje Calvin Larono, S. Pd Nip.197107221999031008	Pembina Tingkat I/IV b	Kabid Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	S1
4	Venny M. Tereima, ST Nip.198201132009021002	Pembina/IVa	Kabid Kawasan Permukiman	S1
5	Lydia Mustica Dondo, S. Pi Nip.197102172000122002	Pembina/IVa	Kabid Perumahan	S1
6	Yuhaini Damopolii, S. Kom Nip.197706172005012015	Penata Tkt. I / III d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
7	Heldi Bahansubu, Amd. TM NIP.198104292011021001	Penata Muda Tkt. I / III b	Kepala UPTD Rusunawa	D3
8	Bachtiar Mokoginta, ST NIP.196808281991021001	Penata Tkt. I / III d	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	S1
9	Rony Dwiyanto Pomayaan, ST Nip.197601242010011004	Penata Tkt. I / III d	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	S1
10	James Otniel Solang, ST Nip.197510032010011004	Penata Tkt. I / III d	Pelaksana	S1
11	Susanti Ani, SE Nip.197612242007012013	Penata Tkt. I / III d	Pelaksana	S1
12	Lenny Kakunsi, SE Nip.198001032011022001	Penata Tkt. I / III c	Pelaksana	S1
13	Yaman Paputungan, ST Nip.196808152007011039	Penata Muda Tkt. I / III b	Pelaksana	S1



14	Saprudin Paputungan Nip.196903201998031008	Penata Muda Tkt. I / III b	Pelaksana	STM
15	Bela Maria Tumangkeng, S.Ars Nip.199703032022032017	Penata Muda/ III a	Pelaksana	S1
16	Ismawaty Suleman Nip.197108282007012013	Penata Muda/ III a	Pelaksana	SMEA
17	Rachmadiani Nip.197708212008012011	Penata Muda/ III a	Pelaksana	SMA
18	Popijadi Lantong Nip.197406022007011014	Pengatur Tkt.I/ II d	Pelaksana	Paket C
19	Arman Robot, S.Kom Nip.19860511 201402 1 001	Penata Tkt.I/ II d	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	S1
20	Wita Paputungan Nip.198305272011022019	Pengatur Tkt.I/ II d	Pelaksana	SMK
21	Hairil Mokoginta, ST.,M.Si Nip.19781022 200604 1 002	Pembina, IV/a	Pelaksana	S2

Tabel.1.1c
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Diklat Struktural

ESELON	PIM II	PIM III	PIM IV	Jumlah
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sudah Ikut Diklat Struktural :	1	3	4	8
Eselon II A				
Eselon II B	1	1	1	
Eselon III A		1	1	
Eselon III B		1	2	
Eselon IV A				
Eselon IV B				
Belum Ikut Diklat Struktural :	-	2	3	5
Eselon II A				
Eselon II B				



ESELON	PIM II	PIM III	PIM IV	Jumlah
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eselon III A				
Eselon III B		2	1	
Eselon IV A			1	
Eselon IV B			1	
Jumlah / Total				13

Berdasarkan komposisi yang terdapat Tabel 1.1a, 1.1b dan 1.1c dapat terlihat bahwa komposisi jumlah pejabat struktural sudah memenuhi



semua jabatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena masih ada jabatan yang kosong yaitu Sekretaris Dinas, Jabatan Kepala UPTD Rusunawa dan Jabatan Fungsional pada bidang kawasan permukiman kosong. Sedangkan jumlah staf pelaksana pada masing-masing bidang khususnya staf teknis yang sesuai dengan bidang yang diperlukan masih kurang, sehingga menjadi salah satu faktor kelemahan untuk dapat menjadi bahan perbaikan dikarenakan Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja Dinas khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program penjabat kepala daerah, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan



cita-cita dan harapan masyarakat terhadap pejabat kepala daerah serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di masa empat tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2.
Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab
yang mempengaruhi Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu
Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	VARIABEL PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
A.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Masih kurangnya ketersediaan rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Ketersediaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh	Kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Belum optimalnya penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman	Regulasi penyediaan PSU lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur berkelanjutan
4	Belum optimalnya pengelolaan akibat kebencanaan (bencana alam dan bencana sosial)	Tingkat Pelayanan penanggulangan bencana alam dan sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2023- 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow periode tahun 2023 -2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah :

**“Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing
Dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur”**

Sebagai penjabaran atas visi diatas, maka *tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow dalam periode empat tahun ke depan* adalah:

1. Mewujudkan kinerja SKPD secara optimal;
2. Meningkatkan kualitas tempa hunian masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat permukiman.

Sedangkan yang menjadi *sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode empat tahun kedepan* antara lain:

1. Meningkatnya manajemen tata kelola pemerintahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menurunnya permukiman kumuh;
3. Menurunnya rumah tidak layak huni.



Table 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Tahun Ke-				Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			
			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4
1	Peningkatan Kualitas tempat hunian masyarakat	Prosentase Luas Permukiman tertata	83,64	80,35	83,30	87,50	Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	57,36	80,91	92,69	100
			53,65	69,10	84,55	100	Menurunnya Permukiman Kumuh	Cakupan Permukiman Kumuh	0,114	0,042	0,044	0,029



Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Tujuan: Peningkatan Kualitas Tempat Hunian Masyarakat

- Meningkatkan kualitas tempat hunian masyarakat;
Indikator Tujuan : Prosentase Rumah Layak Huni
Sasaran : Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni
Indikator Sasaran : Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani

- Meningkatkan kualitas lingkungan sehat permukiman;
Indikator Tujuan : Prosentase Luas Permukiman tertata
Sasaran : Menurunnya Permukiman Kumuh
Indikator Sasaran : Cakupan Permukiman Kumuh



PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dibawah ini adalah table perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025, dengan target sasaran dan program pendukung indikator kinerja serta pagu anggaran.

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	92,69	Program Pengembangan Perumahan	Rp123.081.416,00
				Program Kawasan Permukiman	Rp986.949.589,00
	Menurunnya Permukiman Kumuh	Cakupan Permukiman Kumuh	0,044	Program Peningkatan PSU	Rp7.563.081.424,00
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp3.809.774.726,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.



Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

➤ 85	=SangatBerhasil
$70 \leq x \leq 85$	=Berhasil
$55 < x \leq 70$	=CukupBerhasil
≤ 55	=TidakBerhasil



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”.

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean*(rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran=	
	Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagaiberikut:

Sangat Berhasil	:92,5
Berhasil	:77,5
CukupBerhasil	:62,5
TidakBerhasil	:27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***



2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.

Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran1 : Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni

Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 “Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni” dengan indikator sasaran Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{PRTLH} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}} \times 100$$

Indikator kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja sasaran 1 “Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni” tersebut diatas dapat dilihat pada capaian kegiatan berikut ini :

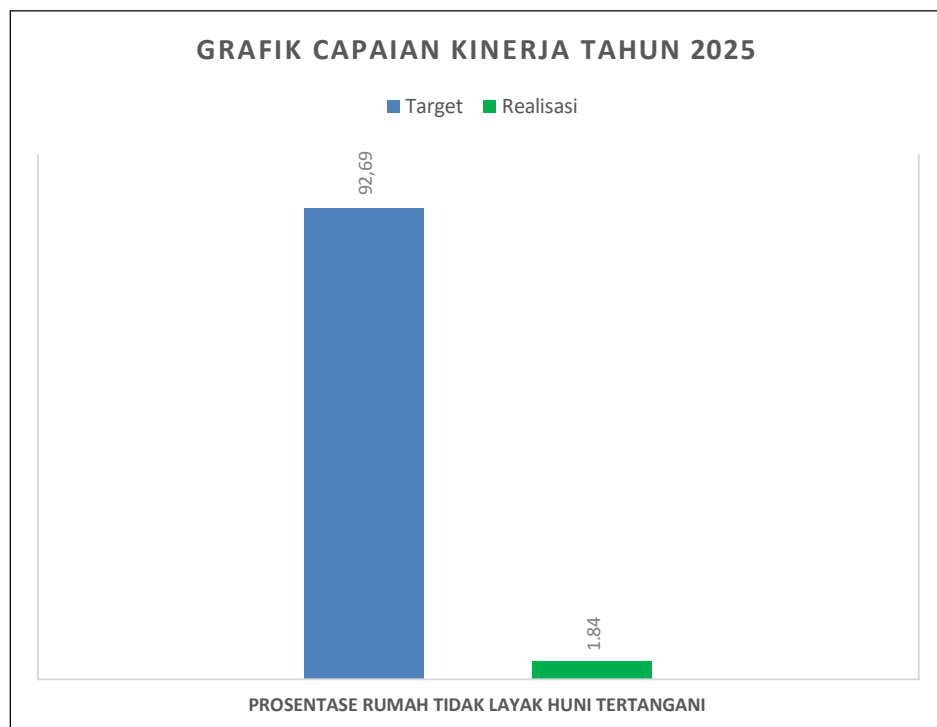
$$\text{PRTLH} = \frac{44 \text{ unit}}{2.379 \text{ unit}} \times 100 = 1,84\%$$



➤ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	92,69	1,84	1,98

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025 dari target 92,69% dan yang terealisasi sebesar 1,84% dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 1,98% maka pencapaian tujuan kinerja sasaran prosentase rumah tidak layak huni tertangani adalah kategori “Tidak Berhasil” yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini;

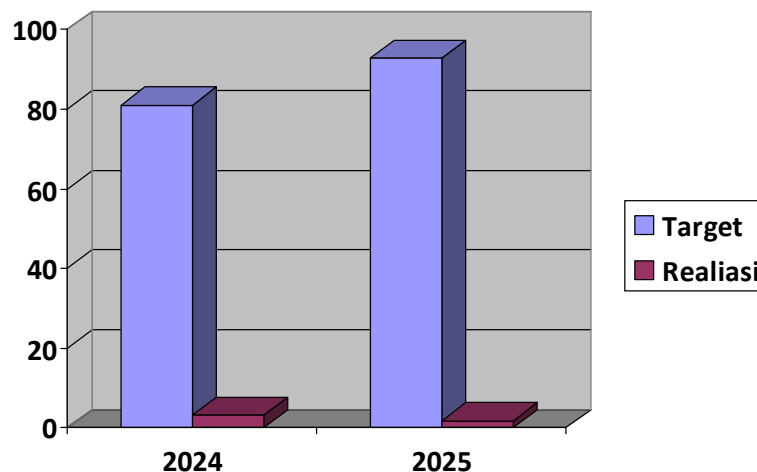




➤ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja v Terhadap Target Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	80,91	3,16	3,91	92,69	1,84	1,98	86,8	2,5

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran rumah tidak layak huni pada tabel diatas, disimpulkan bahwa Capaian indikator kinerja prosentase rumah tidak layak huni pada tahun 2024 sebesar 3,16 % dari target 80,91% dan tahun 2025 menurun sebesar 1,84 % dari target 92,69%. Dengan demikian capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun 2025 ada penurunan jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori "TIDAK BERHASIL". Hal ini di sebabkan karena prosentase capaian antara tahun 2024 sebesar 3,16 % dan tahun 2025 sebesar 1,84 % dengan prosentase capaian kinerja sebesar 1,98 %. Dapat dilihat Pada Grafik dibawah ini :

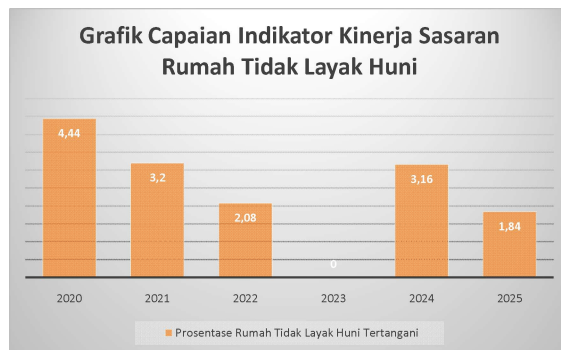




- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	4,44	3,20	2,08	0	3,16	92,69	1,84	1,98	83,35	65,01

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran rumah tidak layak huni pada tabel diatas, disimpulkan bahwa Capaian indikator kinerja prosentase rumah tidak layak huni tertangani pada tahun 2025 menurun sebesar 1,84 % dari target 92,69 %. Dengan demikian capaian kinerja jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “TIDAK BERHASIL”. Hal ini disebabkan karena prosentase capaian sebesar 1,84 %, dapat dilihat pada Grafik dibawah ini;

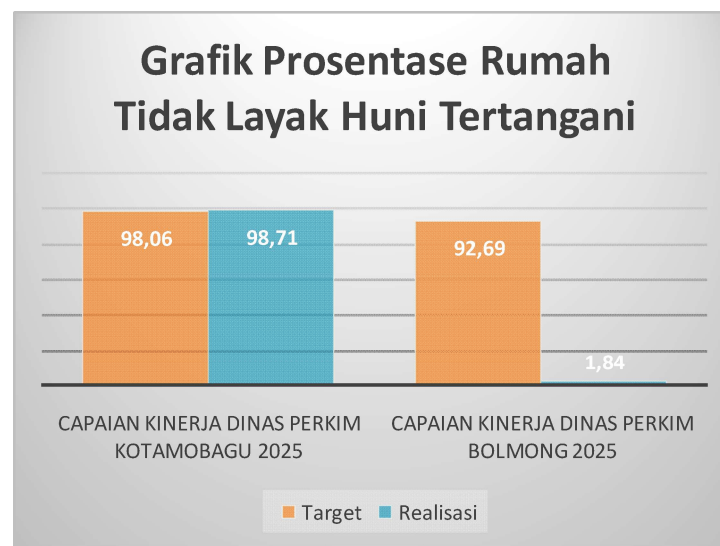




➤ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 ini dengan standar nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Disperkim Kota Kotamobagu Tahun 2025			Capaian Kinerja Disperkim Kab. Bolmong Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	98,06	98,71	100,66	92,69	1,84	1,98	83,30	65,01

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran rumah tidak layak huni pada tabel diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu prosentase rumah tidak layak huni tertangani tahun 2025 realisasinya sebesar 98,71% dari target 98,06% dan capaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bolaang Mongondow prosentase rumah tidak layak huni tertangani tahun 2025 realisasinya sebesar 1,84 % dari target 92,69%. Dengan demikian capaian kinerja antara Disperkim Kota Kotamobagu dan Disperkim Kab. Bolaang Mongondow tahun 2025 ada penurunan jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “TIDAK BERHASIL”. Hal ini disebabkan karena tahun 2025 prosentase capaian kinerja sebesar 1,98 %. Dapat dilihat Pada Grafik dibawah ini :





➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Seperti diketahui bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Dalam situasi apapun orang pasti berupaya memiliki rumah sebagai tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya, mengembangkan hubungan sosial dan membangun lingkungan permukimannya. Rumah sangat bermakna bagi eksistensi seorang manusia, baik sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat. Perumahan dan permukiman selain berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan perwujudan dari lingkungan sosial yang tertib, juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagai penyedia lapangan kerja pendorong pembentukan modal yang besar. Dengan berpijak pada peningkatan dan pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan dan permukiman, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, aktif berperan serta dalam setiap program pembangunan, serta mampu meningkatkan upaya untuk menghimpun modal dan program pembangunan selanjutnya. Pelaksanaan program kawasan permukiman dan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow dimulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan acuan indikator sasaran RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 - 2026, capaian penanganan RTLH tertangani tahun 2025 capaian prosentase rumah layak huni tertangani menjadi 1,84%.



Tabel :PROSENTASE RUMAH LAYAK HUNI TERHADAP TARGET RPD

No	Uraian	Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1.107	1.107	1.072	1.072
2	Rumah Layak Huni	51.991	52.026	52.072	52.072
3	Jumlah Rumah di Kab.Bolmong	55.479	55.479	59.487	60.289
4	Persentase Rumah Layak Huni	97,92	93,77	87,53	86,37
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni tertangani	0	3,16	1,84	-
6	Target RPJMD selama5 Tahun Target RPD selama 4 Tahun	57,36	80,91	92,69	100
7	PersentasePenurunan/tahun	0	3,91	1.98	-

Selanjutnya untuk rincian penanganannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, untuk tahun 2025 tidak ada penanganan RTLH;

Tabel: PENANGANAN RTLH PER KECAMATAN s/d Tahun 2025

No	Kecamatan	JumlahRumahdi KabupatenBolaang Mongondow(Unit)	RumahTidak LayakHuni (Unit)sumber data TNP2K	RumahTidakLayak Huni(Unit) tertangani tahun 2016 s/d 2025	SisaRumah TidakLayak Huni(Unit) Belum Tertangani	JumlahRumah LayakHuni (Unit)
1	DumogaBarat	3403	410	522	-112	3515
2	DumogaTengah	3060	186	254	-68	3128
3	DumogaUtara	2732	285	81	204	2528
4	DumogaTenggara	2009	125	165	-40	2049
5	DumogaTimur	4725	907	612	295	4430
6	Dumoga	3766	212	212	0	3766
7	Lolayan	5204	497	293	204	5000
8	PassiBarat	3989	159	127	32	3957
9	PassiTimur	3508	254	220	34	3474
10	Bilalang	1496	105	109	-4	1500
11	Poigar	3748	449	238	211	3537
12	Bolaang	4036	501	464	37	3999
13	BolaangTimur	3097	116	130	-14	3111
14	Lolak	5978	583	371	212	5766
15	Sangtombolang	2347	333	252	81	2266
Jumlah		53.098	5.122	4.094	1.028	52.070



➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tahun 2025

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Efisiensi Sumber Daya
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	1,84	97,59	96,05

Jika dikaitkan antara realisasi kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif tidak baik yaitu 1,84 % dengan penyerapan anggaran program pendukung sebesar 97,59% menunjukkan bahwa tingkat efisiensi indikator kinerja penggunaan Sumber Daya adalah 96,05%.

➤ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
I	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	986.949.589,00	963.212.476,00	97,59
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha</i>	90.100.058,00	89.296.867,00	99,11
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	90.100.058,00	89.296.867,00	99,11
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	896.849.531,00	873.915.609,00	97,44
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	879.091.750,00	856.306.298,00	97,41
2	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	17.757.781,00	17.609.311,00	99,16
II	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	0,00	0,00
	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah K abupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00



Sasaran2 : Menurunnya Pemukiman Kumuh

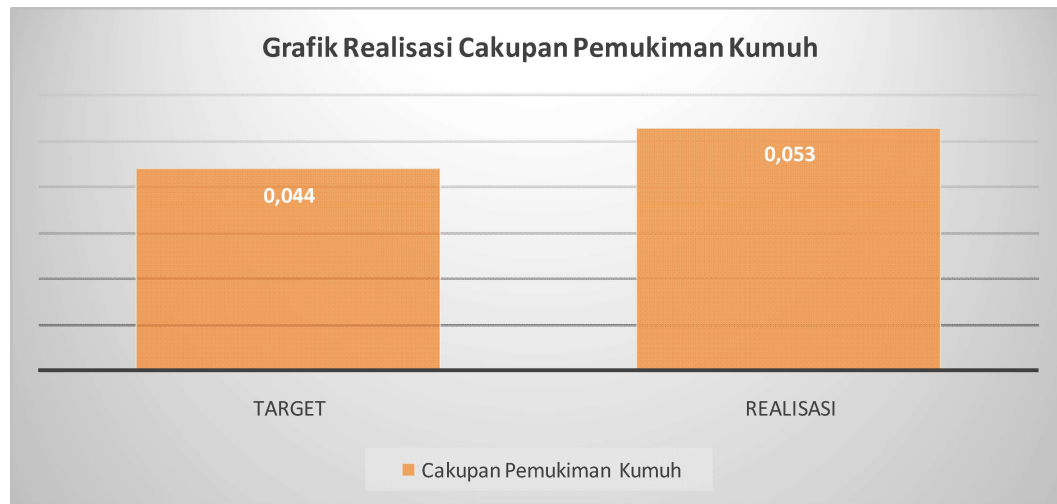
Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 “Menurunnya Permukiman Kumuh” dengan indikator sasaran Cakupan Pemukiman Kumuh dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{CPK} = \frac{14,32\text{Ha}}{27,25\text{ Ha}} \times 100 = 52,55\text{ Ha}$$

➤ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%
Cakupan Permukiman Kumuh	0,044	0,053	120,45

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 dari target 0,044 dan yang terealisasi sebesar 0,053 dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 120,45 maka pencapaian tujuan kinerja sasaran Cakupan Permukiman Kumuh adalah kategori “Sangat Berhasil” yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



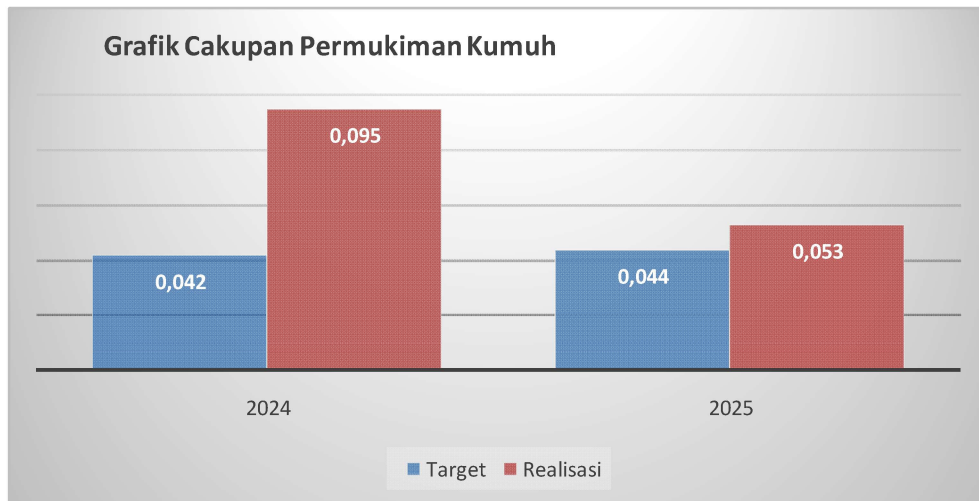
- **Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Cakupan Permukiman Kumuh	0,042	0,095	226,19	0,044	0,053	120,45	69,10	164,52

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran Cakupan Permukiman Kumuh pada tabel diatas, disimpulkan bahwa Capaian indikator kinerja cakupan permukiman kumuh pada tahun 2024 turun sebesar 0,095 % dari target 0,042 % dan tahun 2025 turun sebesar 0,053 % dari target 0,044 %. Dengan demikian capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun 2025 ada penurunan sebesar 0,009 % jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “SANGAT BERHASIL”. Hal ini disebabkan karena



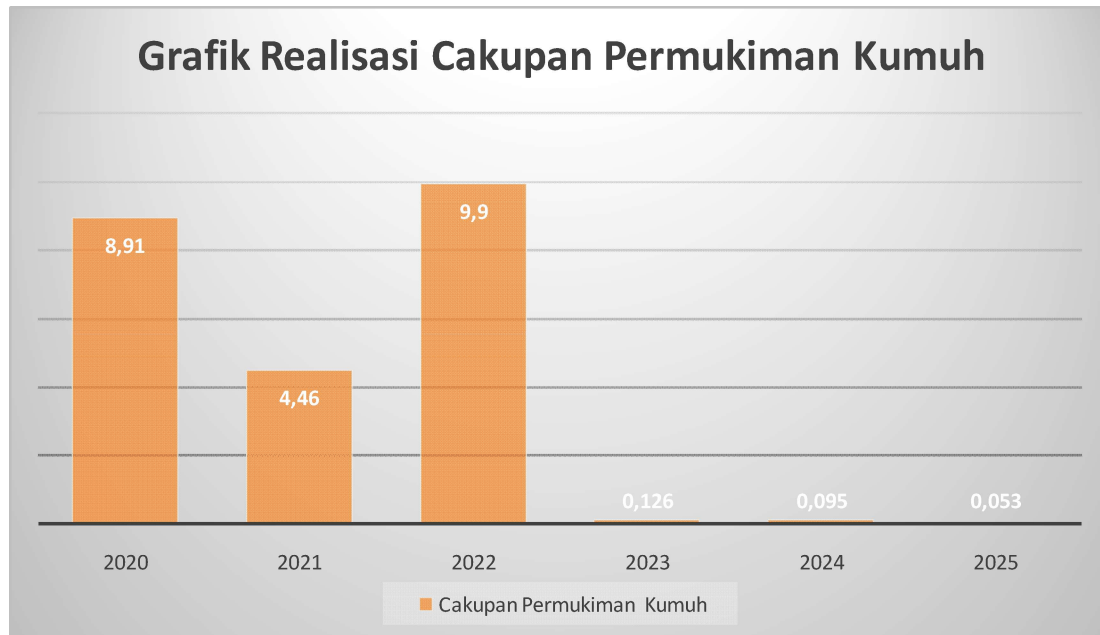
prosentase capaian antara tahun 2024 sebesar 226,19 % dan tahun 2025 sebesar 120,45 % dengan prosentase capaian kinerja sebesar 18,77 %. Dapat dilihat Pada Grafik dibawah ini :



- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Cakupan Permukiman Kumuh	8,91	4,46	9,90	0,126	0,095	0,044	0,053	120,45	0,029	164,52

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran rumah tidak layak huni pada tabel diatas, disimpulkan bahwa Capaian indikator kinerja prosentase cakupan permukiman kumuh pada tahun 2025 menurun sebesar 52,55 % dari target 0,044 %. Dengan demikian capaian kinerja jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”. Hal ini disebabkan karena prosentase capaian sebesar 119,431 %, dapat dilihat pada Grafik dibawah ini;



- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 ini dengan standar nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Disperkim Kota Kotamobagu Tahun 2025			Capaian Kinerja Disperkim Kab. Bolmong Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Cakupan Permukiman Kumuh	20,70	25,30	122,23	0,044	0,053	120,45	69,10	164,52

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran rumah tidak layak huni pada tabel diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu Cakupan Permukiman Kumuh tahun 2025 realisasinya sebesar 25,30% dari target 20,70% dan capaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bolaang Mongondow Cakupan Permukiman Kumuh tahun 2025 realisasinya sebesar 0,053 % dari target 0,044%. Dengan demikian capaian kinerja antara Disperkim Kota Kotamobagu



dan Disperkim Kab. Bolaang Mongondow tahun 2025 ada penurunan jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “SANGAT BERHASIL”.



➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

1. Cakupan Permukiman Kumuh (Sasaran2)

Penanganan permukiman kumuh dilaksanakan melalui penurunan kawasan kekumuhan dengan target 49 kawasan dari 15 Kecamatan dengan luas kawasan kumuh sebesar 832,32 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 235 Tahun 2017 dan di Tahun 2021 terjadi Revisi Penetapan Lokasi Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan target



49 kawasan/desa dari 15 Kecamatan dengan luas kawasan kumuh sebesar 713,43 Ha.

Penurunan kekumuhan ini dilaksanakan dan direalisasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Program/Kegiatan sebagai berikut :



**Daftar Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh
Ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KETERANGAN/LOKASI
I 1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Ayong Kec. Sangtombolang Desa Dumoga I Kec. Dumoga Desa Dumoga Tiga Kec. Dumoga Timur Desa Lolak Kec. Lolak Desa Maelang Kec. Sangtombolang Desa Mopuya Selatan I Kec. Dumoga Utara Desa Motabang Kec. Lolak Desa Pasir Putih Kec. Sangtombolang Desa Pusian Barat Kec. Dumoga Desa Pusian Selatan Kec. Dumoga Desa Bangomolunow Kec. Bolaang
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Desa Tanoyan Utara Kec. Lolayan
II 1	PROGRAM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembangunan Saluran Drainase	Desa Mondatong Kec. Poigar Desa Inobonto Kec. Bolaang Desa Mariri Baru Kec. Poigar Desa Pinogaluman Timur Kec. Lolak Desa Ambang II Kec. Bolaang Timur Desa Bolaang Kec. Bolaang Timur Desa Otam Kec. Passi Barat Desa Ikhwan Kec. Dumoga Barat Desa Babo Kec. Sangtombolang
		Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Desa Langagon I Kec. Bolaang Desa Mopugad Utara II Kec. Dumoga Utara Desa Konarom Barat Kec. Dumoga Tenggara Desa Tungoi II Kec. Lolayan Desa Solog Kec. Lolak Desa Motabang Kec. Lolak Desa Lalow Kec. Lolak



			Desa Tandu Kec.Lolak Kel.Inobonto I Kec.Bolaang Desa Diat Kec.Lolak Desa Poopo Barat Kec.Passi Timur Desa Mariri Baru Kec.Poigar Desa Passi Kec.Passi Barat Desa Mongkoinit Kec.Lolak Desa Bombanon Kec.Lolayan Desa Tapaáog Kec.Lolayan Desa Kopandakan II Kec.Lolayan Desa Lolayan Kec.Lolayan Desa Dulangon Kec.Lolak Desa Tonom Kec.Dumoga Timur Desa Ayong Kec.Sangtombolang Desa Bakan Kec.Lolayan Desa Tombolango Kec.Lolak Desa Bolaang Kec.Bolaang Timur Desa Kosio Kec.Dumoga Tengah Desa Cempaka Kec.Samngtombolang Desa Wangga Kec.Passi Barat Desa Tanoyan Utara kec.Lolayan Desa Sinsingon Barat Kec.Passi Timur Desa Tiberias Kec.Poigar Kel.Imandi Kec.Dumoga Timur Desa Poigar II Kec.Poigar Desa Ponompiaan Kec.Dumoga Desa Pusian Selatan Kec.Dumoga Desa Labuan Uki Kec.Lolak Desa Tungoi I Kec.Lolayan Desa Buntalo Kec.Lolak Desa Toraut Tengah Kec.Dumoga Barat Desa Uuwan Kec.Dumoga Barat Desa Mogoyungung I Kec.Dumoga Timur
--	--	--	---



Adapun sampel pelaksanaan penurunan kekumuhan tersebut, adalah sebagai berikut :

- **Sample Tahun 2025;**
- **Kegiatan Jalan Lingkungan Paving Block**



Desa Tiberias



Desa Muntoi



Desa Poigar II



Kelurahan Imandi



➤ **Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase**



Desa Mondatong



Desa Inobonto

➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Efisiensi Sumber Daya
Cakupan Permukiman Kumuh	120,45	95,98	24,5

Jika dikaitkan antara realisasi kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik yaitu 120,45 % dengan penyerapan anggaran program pendukung sebesar 95,98% menunjukkan bahwa tingkat efisiensi indikator kinerja penggunaan Sumber Daya adalah 24,5 %.



➤ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
I.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	986.949.589,00	963.212.476,00	97,59
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	90.100.058,00	89.296.867,00	99,11
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	90.100.058,00	89.296.867,00	99,11
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	986.949.589,00	963.212.476,00	97,59
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	879.091.750,00	856.306.298,00	97,41
2	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	17.757.781,00	17.609.311,00	99,16
II.	PROGRAM RASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN	7.563.081.424,00	7.259.420.178,00	95,98
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	7.563.081.424,00	7.259.420.178,00	95,98
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	154.937.624,00	154.552.295,00	99,75
1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.408.143.800,00	7.104.867.883,00	95,91

7. Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian
				Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan Kualitas tempat hunian masyarakat	Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	83,30	1,84	1,98	Tidak Berhasil
		Menurunnya Permukiman Kumuh	Cakupan Permukiman Kumuh	0,044	0,053	120,45	Sangat Berhasil



Kesimpulan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dicapai sebesar 57,84 %penurunan jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori“BERHASIL”.



REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 sebesar Rp.12.846.412.063,00 turun 74 % dibanding anggaran yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 sebesar Rp.17.184.229.641,00.

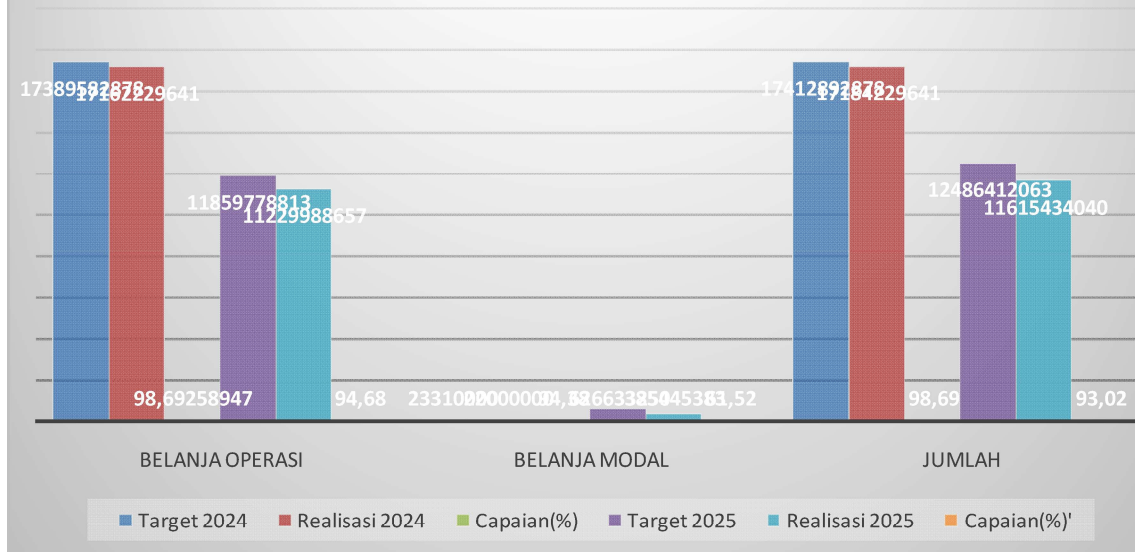
Perbandingan realisasi anggaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah :

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jenisbelanja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	17.389.582.878,00	17.162.229.641,00	98,69	11.859.778.813,00	11.229.988.657,00	94,68
Belanja Modal	23.310.000,00	22.000.000,00	94,38	626.633.250,00	385.445.383,00	61,51
Jumlah	17.412.892.878,00	17.184.229.641,00	98,69	12.486.412.063,00	11.615.434.040,00	93,02



Grafik Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025



Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 dan tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada tabel grafik diatas. Belanja Tahun 2024 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya yang meliputi Belanja Operasi realisasinya sebesar Rp. 17.162.229.641,00 dan Belanja Modal Rp. 22.000.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 17.184.229.641,00 atau sebesar 98,69%. Dan Belanja Tahun 2025 meliputi Belanja Operasi realisasinya sebesar Rp. 11.229.988.657,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 385.445.383,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 11.615.434.040,00 atau sebesar 93,02%. Dari uraian tersebut ditahun 2025 terjadi penurunan Belanja Operasi.



Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel 3.3 di bawah:

Tabel 3.3.
REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE PENYERAPAN	SISA ANGGARAN
		(Rp.)	(Rp.)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.809.774.726,00	3.281.123.555,00	86,12	528.651.171,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.515.607.275,00	2.270.916.023,00	90,27	244.691.252,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.439.525.096,00	2.198.903.313,00	90,14	240.621.783,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.073.734,00	38.789.553,00	92,19	3.284.181,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.008.445,00	33.223.157,00	97,69	785.288,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	30.750.000,00	25.425.000,00	82,68	5.325.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.750.000,00	25.425.000,00	82,68	5.325.000,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	309.953.635,00	306.672.509,00	98,94	3.281.126,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.059.200,00	3.845.069,00	63,46	2.214.131,00
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.518.192,00	2.782.942,00	79,10	735.250,00
3	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300.376.243,00	300.044.498,00	99,89	331.745,00
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	626.633.250,00	385.445.383,00	61,51	241.187.867,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.633.250,00	107.448.000,00	92,12	9.185.250,00
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.000.000,00	277.997.383,00	54,51	232.002.617,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	183.642.756,00	178.152.990,00	97,01	5.489.766,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.237.300,00	8.076.548,00	61,01	5.160.752,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.405.456,00	170.076.442,00	99,81	329.014,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025



	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE PENYERAPAN	SISA ANGGARAN
		(Rp.)	(Rp.)	%	Rp
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.187.810,00	114.511.650,00	79,97	28.676.160,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.427.810,00	51.209.650,00	64,47	28.218.160,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.100.000,00	2.091.600,00	99,60	8.400,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000,00	6.210.400,00	93,25	449.600,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	123.081.416,00	109.162.806,00	88,69	13.918.610,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.272.978,00	20.829.425,00	85,81	13.918.610,00
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.628.630,00	7.030.325,00	92,16	598.305,00
2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5.656.470,00	5.504.500,00	97,31	151.970,00
3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.099.754,00	3.118.350,00	61,15	1.981.404,00
4	Pendataan dan verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.888.124,00	5.176.250	87,91	711.874,00
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	17.980.046,00	7.907.910,00	43,98	10.072.136,00
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	5.306.400,00	2.882.100,00	54,31	2.424.300,00
2	Rekrut Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	2.600.425,00	2.561.610,00	98,51	38.816,00
3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	5.171.979,00	1.232.100,00	23,82	3.939.879,00
4	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	4.901.241,00	1.232.100,00	25,14	3.669.141,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	00
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	00
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	00
1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	14.028.392,00	13.625.471,00	97,13	402.921,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	14.028.392,00	13.625.471,00	97,13	402.921,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025



	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE PENYERAPAN	SISA ANGGARAN
		(Rp.)	(Rp.)	%	Rp
III..	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	986.949.589,00	963.212.476,00	97,59	23.737.113,00
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	90.100.058,00	89.296.867,00	99,11	803.191,00
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	90.100.058,00	89.296.867,00	99,11	803.191,00
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	896.849.531,00	873.915.609,00	97,44	22.933.922,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	879.091.750,00	856.306.298,00	97,41	22.785.452,00
2	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	17.757.781,00	17.609.311,00	99,16	148.470,00
IV.	PROGRAM PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN	7.563.081.424,00	7.259.420.178,00	95,98	303.661.246,00
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	7.563.081.424,00	7.259.420.178,00	95,98	303.661.246,00
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	154.937.624,00	154.552.295,00	99,75	385.329,00
2	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.408.143.800,00	7.104.867.883,00	95,91	303.275.917,00
V.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.524.908,00	2.515.025,00	71,35	1.009.883,00
	<i>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	3.524.908,00	2.515.025,00	71,35	1.009.883,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	3.524.908,00	2.515.025,00	71,35	1.009.883,00
J U M L A H		12.486.412.063,00	11.615.434.040,00	93,02	870.978.023,00



BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada *sasaran menurunnya rumah tidak layak huni* **Tidak Berhasil** dan *menurunnya permukiman kumuh* **Sangat Berhasil**. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 mencapai **93,02%**.

Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada tahun 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis dinas 2023-2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi dinas tahun 2023-2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berbagai upaya maksimal melalui program dinas yang dilaksanakan dimaknai sebagai berikut :



1. Bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara maksimal, khususnya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan Program Prioritas Nasional yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan salah satu sektor strategis dalam upaya membangun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Sebagai unit kerja yang bersifat pelayanan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang mewujudkan perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan karakteristik kebutuhan.
3. Dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dinas, sehingga sasaran pembiayaan kegiatan diupayakan tepat sasaran dan tepat tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk keterlanjutan pembangunan.
4. Salah satu dinas yang diorientasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka diupayakan dengan melakukan pembinaan ke pagawaian agar senantiasa terbentuk aparatur dengan integritas yang tinggi.
5. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat telah dan akan terus dilakukan terus sebagai forum untuk sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

4.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :



1. Mengakomodir program dan kegiatan pada Rencana Kerja tahun berikutnya berdasarkan usulan hasil musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan target Rencana Strategis tahun 2023-2026.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembang perumahan dalam upaya penyediaan rumah sangat sederhana sebagai alternatif pilihan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi.

Lolak, Januari 2026

KEPALADINAS,



YARLISAWALUDDINHATAM, ST,ME

Pembina Utama Muda

Nip.19710722200012 1 003

